

## Mendefinisikan Muslim Moderat dan Konteks Sosio-Politik Di Indonesia

Ridwan<sup>1\*</sup>; Djayadi Hanan<sup>2</sup>; Syafi'i Anwar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ridwan, Universitas Islam Internasional Indonesia; <sup>2</sup>Universitas Islam Internasional Indonesia;

<sup>3</sup>President University, Indonesia.

\*almakassary@yahoo.com

### Abstract

*Recent developments show that religious moderation initiated by the Government of Indonesia through the Ministry of Religious Affairs is increasingly being studied and trained. However, conceptually, religious moderatism, specifically moderate Muslims still need to be discussed further because there is no consensus on its definition and conceptual framework. Moderate Muslims exist is a social construction that is highly dependent on the socio-political context of Indonesian Muslims. With a literature review approach from a qualitative approach, this paper finds that the definition of moderate Muslim is very contextual and related to the social and political context of Muslim communities in Indonesia. This paper attempts to fill the gap on the definition of moderate Muslims by looking critically at the conservative and liberal definitions of Muslims from an analysis of the socio-political context in the country.*

**Keywords:** Muslim; moderate; conservative; liberal; Indonesian government

### Abstrak

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa moderasi beragama yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama semakin banyak dipelajari dan dilatih. Namun, secara konseptual, moderatisme agama, khususnya Muslim moderat masih perlu dibahas lebih lanjut karena belum ada konsensus mengenai definisi dan kerangka konseptualnya. Muslim moderat yang ada merupakan konstruksi sosial yang sangat bergantung pada konteks sosial-politik umat Islam Indonesia. Dengan pendekatan kajian pustaka dari pendekatan kualitatif, tulisan ini menemukan bahwa definisi muslim moderat sangat kontekstual dan terkait dengan konteks sosial dan politik masyarakat muslim di Indonesia. Tulisan ini mencoba mengisi kesenjangan definisi Muslim moderat dengan melihat secara kritis definisi Muslim konservatif dan liberal dari analisis konteks sosial-politik di negara ini.

**Kata Kunci:** Muslim; moderat; konservatif; liberal; pemerintah Indonesia

### Pendahuluan

Indonesia adalah satu negara yang majemuk dari segi suku, agama, ras dan bahasa sehingga pengelolaan keragaman adalah tantangan bagi Indonesia semenjak negara kesatuan republik Indonesia dibentuk. Persoalan konflik intra dan antar agama masih terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan paska reformasi 1998, negara ini pernah diguncang oleh konflik bernuansa agama di Ambon dan Poso, dan juga konflik bernuansa etnik di beberapa kota di Kalimantan, misalnya Sambas dan Sampit. Meskipun saat ini konflik bernuansa agama relatif mereda dan ada upaya pemerintah untuk menjaga ketenangan dan hubungan antar agama dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada 2017 dan Front Pembela Islam pada 2018, namun ancaman ekstremisme keagamaan tidak serta merta hilang. Selain itu, penguatan arus utama konservatisme beragama merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekstremisme agama jika terjadi upaya radikalisasi di tengah protes terhadap ketidakuntungan ekonomi dan kegagalan pemerintah menyejahterakan masyarakatnya.

Diskursus moderatisme agama di Indonesia semakin banyak mendapat perhatian pada masa pemerintahan Jokowi, di mana Kementerian Agama sangat gencar melakukan

kampanye moderatisme agama melalui kajian dan publikasi buku, training serta pengabdian masyarakat di berbagai kampus yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selain itu, ormas keagamaan, Muhammadiyah dan NU, untuk menyebut dua organisasi besar Muslim, dan juga berbagai NGO di tanah air aktif melakukan kampanye moderasi beragama. Bahkan, pendirian kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di maksudkan untuk mengenalkan moderatisme Islam ke dunia luar, dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari luar negeri untuk belajar di kampus yang terletak di Depok, Jawa Barat. Dengan demikian, moderasi keagamaan adalah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membangun kerukunan antara umat beragama dan mencegah konflik antar agama.

Namun, secara konseptual moderasi beragama tampaknya masih perlu dirumuskan mengingat konsep moderasi acap dikaitkan dengan Barat, terutama ketika Amerika Serikat melancarkan perang melawan teror, di mana para pelakunya diklaim sebagai orang yang tidak moderat, alias memilih jalan keagamaan yang ekstrem. Paska tragedi hitam September Kelabu 2001, dunia bersatupadu memerangi terorisme yang diinspirasi agama. Hal ini tampaknya membenarkan pandangan Mark Juersmeyer bahwa trend terorisme modern adalah terorisme keagamaan. Sama halnya, fakta ini membenarkan ramalan Huntington bahwa konflik masa depan bukan lagi konflik ideologi dan ekonomi, namun konflik budaya dan agama.

Karenanya, dalam rangka memahami moderasi beragama dari sebuah perspektif yang lebih luas, perlu upaya untuk mendiskusikan dan merumuskan kembali definisi Muslim moderat, termasuk membahas pengertian konservatisme dan juga liberalisme Islam. Juga, melihat konteks sosio-politik Muslim Indonesia, terutama sejak era reformasi Indonesia yang bergulir pada tahun 1998.

## Metode

Naskah akademik ini menggunakan tinjauan pustaka, serta berdasarkan pengamatan dan diskusi penulis dengan sumber lain yang relevan, terutama akademisi atau peneliti yang mengerjakan topik tersebut, untuk membahas hasil awal makalah. Dengan menerapkan pendekatan ini, artikel ini mencoba untuk lebih memahami definisi Muslim Indonesia dan konteks sosial-politiknya. Dalam praktiknya, ini akan membahas secara memadai definisi Muslim konservatif radikal dan liberal dan menganalisis konteks sosial-politik untuk memahami Muslim Indonesia dari perspektif yang lebih luas.

## Hasil dan Pembahasan

Gagasan Muslim Moderat mulai dikembangkan secara luas secara internasional. Misalnya, Amerika Serikat, yang sering diganggu dengan radikal yang mendorong kekerasan yang terinspirasi agama, membutuhkan program untuk mendorong ideologi yang melawan jaringan ekstremisme. Dalam hal ini, ideologi dibangun tidak hanya di atas konsep-konsep Barat, tetapi mengacu pada "tradisi dalam paradigma Islam yang terbuka, toleran dan pluralistik".<sup>1</sup> Ketika tradisi-tradisi ini dihidupkan dalam komunitas Muslim, ini akan mendorong gerakan akar rumput untuk perubahan. Namun, Mirahmadi dalam *Navigating Islam in America* menyatakan bahwa karena pemerintah Amerika Serikat dengan penuh semangat mempromosikan demokrasi dan kebebasan, yang dengannya para sarjana menemukan diri mereka sebagai "moderat". Di sini, diperlukan kemampuan untuk menilai tulisan-tulisan para ulama yang ditujukan kepada publik mereka, tidak hanya pada apa yang mereka sajikan kepada khalayak Barat, karena sering ada perbedaan tajam antara pseudo-moderat untuk konsumsi publik dan apa yang mereka hasilkan untuk komunitas Muslim.

---

<sup>1</sup> Hedieh Mirahmadi, "Navigating Islam in America," dalam *The Other Muslims: Moderate and Secular*, ed. oleh Zeyno Baran (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 31, doi:10.1057/9780230106031\_2.

Sementara itu, beberapa ulama di negara ini juga telah menggunakan istilah Muslim moderat dalam studi mereka. Misalnya, Umar menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengampanyekan 'Islam Moderat' yang melekat pada demokrasi. Dalam hal ini Zuhur<sup>2</sup> menyatakan bahwa moderat dalam konteks ini lebih tepat sebagai Muslim sekuler yang mempromosikan kebijakan dan perubahan dalam masyarakat Muslim yang sesuai dengan tujuan AS. Terakhir, Kementerian Agama<sup>3</sup> mendefinisikan moderatisme sebagai "*cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama*".

Singkatnya, Islam moderat adalah pemahaman atau pandangan yang memandang Islam sesuai dengan demokrasi, mendukung kebebasan sipil, mengakomodasi hukum Syariah dan sekuler, serta memiliki pandangan terbuka dan toleran terhadap perspektif alternatif. Selain itu, muslim moderat menerapkan pola pikir, sikap dan perilaku yang selalu menempatkan dirinya di jalan tengah, selalu berlaku adil dan tidak mengikuti jalan ekstrim dalam memeluk agama.

Baru-baru ini, studi dan pelatihan tentang Muslim moderat sebagian besar dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Studi Muslim Moderat menguat selama era Jokowi sebagai presiden.<sup>4</sup> Namun, upaya moderasi beragama, termasuk Islam, telah menjadi gejala global.<sup>5</sup> Oleh karena itu, studi tentang Muslim Moderat perlu dilakukan.

Saat ini, definisi Muslim moderat telah ditafsirkan secara beragam. Di satu sisi, Muslim moderat sering dibandingkan dengan Muslim radikal konservatif. Selain itu, ada pandangan bahwa sebagian besar kerangka Islam radikal berasal dari Barat, jadi penting untuk melihat secara kritis bagaimana definisi Muslim Moderat cocok dengan konteks tanah air. Moderasi Islam bukanlah sesuatu yang telah diberikan sehingga mendefinisikan dan menganalisis konteks sosial-politik penting untuk dilanjutkan. Menurut Rashid "Islam Moderat atau Muslim Moderat adalah proses konstruksi identitas yang sedang berlangsung, khususnya, identitas Islam yang dapat menjadi cetak biru untuk reformasi moral, sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan ajaran agama Islam".<sup>6</sup> Salah satu cara untuk mendefinisikan Muslim moderat berasal dari pandangan elit politik Muslim tentang Islamisme, sesuatu yang belum dieksplorasi dalam studi Muslim moderat di Indonesia di masa lalu.

### ***Islam Konservatif dan Radikal***

Pada umumnya, Islam konservatif dan radikal dapat didefinisikan dalam berbagai perspektif. Martin van Bruinessen, misalnya, mendefinisikan Islam konservatif dan radikal sebagai aliran pemikiran yang menolak reinterpretasi ajaran Islam secara bebas dan progresif dan mempertahankan interpretasi standar dan sistem sosial.<sup>7</sup> Sementara itu, Maghfuri menunjukkan bahwa leksikon konservatif terkait dengan praktik pemahaman tekstual dan literal serta membuang interpretasi yang berbeda dan mendorong seseorang atau kelompok untuk mengubah pola pikir konservatif terhadap ajaran Islam menjadi perilaku atau tindakan radikal.

<sup>2</sup> Sherifa Zuhur, "J is for Jihad.," *PRECISION IN THE GLOBAL WAR ON TERROR: (Strategic Studies Institute, US Army War College, 2008)*, <https://www.jstor.org/stable/resrep12057.40>.

<sup>3</sup> Tim Penulis, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 17–18.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 19.

<sup>5</sup> Radzuwan Ab Rashid dkk., "Conceptualizing the characteristics of moderate Muslims: a systematic review," *Social Identities* 26, no. 6 (2020): 829–41, doi:10.1080/13504630.2020.1814720.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 837.

<sup>7</sup> Martin van Bruinessen, ed., *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn,"* Books and Monographs (Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2013), <https://www.cambridge.org/core/books/contemporary-developments-in-indonesian-islam/210B3775049E75B30ED7A7CD07485727>.

Beberapa sarjana telah mendefinisikan CRI sebagai gerakan dan pemikiran yang memonopoli kebenaran dan menggunakan pendekatan literal dalam memahami teks-teks Islam. Istilah konservatisme dapat merujuk pada organisasi Muslim anti-mainstream yang sering mendukung diri mereka sendiri dan berpikir kelompok lain salah. Konservatisme Islam, dengan demikian, adalah kelompok yang menggunakan teks-teks Syariah Islam dan memahaminya secara harfiah dan eksklusif. Dalam hal ini, konservatisme bertentangan dengan liberalisme Islam yang memahami teks secara kontekstual. Selain itu, Islam konservatif dan radikal mendukung penerapan syariat Islam sebagai dasar hukum negara.<sup>8</sup>

Sementara itu, dari perspektif teologi dan sejarah Islam, akar konservatif radikal dapat ditelusuri kembali melalui ideologi Salafisme. Seperti yang ditunjukkan Jamhari dan Saifuddin, Salafisme adalah cabang reformasi ideologi dan gerakan dalam Muslim Sunni pada abad ke-19. Ia mengklaim bahwa kata Salaf berasal dari ekspresi dan manifestasi al Salaf *al shalih*, yang berarti "pendahulu yang saleh".<sup>9</sup> Ini mengacu pada tiga generasi pertama Muslim yang mewakili "zaman keemasan Islam dan Muslim, yang diklaim sebagai manifestasi Islam murni. Ketiga generasi ini terdiri dari nabi Muhammad dan para sahabatnya (*syahadat*), pengikut para sahabat (*tabi'in*), dan pengikut para pengikut para sahabat (*tabi'it tabi'in*) Ketiga generasi tersebut dianggap sebagai generasi awal umat Islam, dan mereka dianggap sebagai pengikut saleh nabi Muhammad yang mengikuti metode dan praktik keaslian gagasan Islam.<sup>10</sup> Dengan demikian, ideologi dan gerakan Salafi menuntut penerapan Al-Qur'an dan sunnah (perkataan dan perilaku Nabi Muhammad) sepenuhnya dan menghindari inovasi agama (*bid'a*). Akar teologi Salafi berasal dari gagasan Ahmad ibn Hanbal (w.856 M) bersama dengan kelompok ahl al haditsnya, yang cenderung pendekatan tekstual dan kaku. Ibnu Hanbal berpendapat otoritas teks agama dan dia bersikeras bahwa wahyu (*al wahyu*) berada di atas akal (*al ra'yu*). Secara ideologis, Salafisme sering dianggap sebagai intoleransi, kaku, dan reaksioner atau anti-reformasi. Namun, kristalisasi landasan teologis dan sosial-politik Salafisme dikembangkan oleh dua cendekiawan Islam terkemuka, Ibnu Taimiyyah (w.1328 M) dan Muhammad ibn Abdul al Wahhab (w.1792).

Melanjutkan Ibnu Hanbal, Ibnu Taimiyyah terutama berfokus pada pemurnian teologis Islam, terutama dengan menyerukan umat Islam agar kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengacu pada praktik-praktik generasi Muslim awal, menghindari dan menolak pendekatan filosofis dan rasional. Dia mempertahankan otoritas kitab suci atas akal serta mengkritik ritual dan praktik keagamaan populer seperti memperingati orang mati, mengunjungi kuburan, dan ritual keagamaan tradisional lainnya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.

Setelah itu, pemurnian teologis Ibnu Taimiyyah mempengaruhi beberapa reformis Muslim di Timur Tengah dan Afrika pada abad ke-18 hingga ke-19. Di antara para reformis, Muhammad Ibn Al Wahhab, seorang ulama dan pengkhotbah terkenal di Arab Saudi (w.1792) bersikeras gerakan kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah secara mutlak, menyatakan perlunya bagi umat Islam untuk memurnikan keyakinan mereka (aqidah) dan memperkuat monoteisme ketat atau tauhid (kesatuan ilahi atau keesaan Tuhan). Berbeda dengan Ibnu Hanbal dan Taimiyyah, al Wahhab mempertahankan pendekatan yang lebih ketat, kaku, dan konservatif dalam ajaran tauhidnya. Dia menyatakan bahwa siapa pun yang tidak mengikuti ajarannya adalah seorang dan murtad dan umat Islam dibenarkan

<sup>8</sup> Leonard C. Sebastian, Syafiq Hasyim, dan Alexandre R. Arifianto, "Introduction: Rising Islamic conservatism in Indonesia: Islamic groups and identity politics," dalam *Rising Islamic Conservatism in Indonesia*, 1 ed. (London: Routledge, 2020).

<sup>9</sup> Jamhari dan J. Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

<sup>10</sup> Ibid.

untuk melakukan jihad (perang suci) melawan orang. Mengingat kenyataan ini, ajarannya secara luas dikenal sebagai Wahabisme.

Secara umum, Wahabisme membagi dua perspektif teologis atas dasar umat Islam yang berkomitmen pada tauhid dan mushrik. Dari keberangkatan ini, Wahabisme mengembangkan kampanye melawan Syiah, tasawuf atau mistisisme dan inovasi keagamaan lainnya, yang dianggap sebagai bid'ah. Untuk memperkuat ajaran teologis dan orientasi politiknya, Wahabisme mengembangkan kerja sama dengan Muhammad Ibn Saud (w.1765 M) untuk mendirikan Arab Saudi pada tahun 1932 bersama dengan Wahabisme sebagai doktrin agama utama negara.

Dari pembahasan di atas, perlu dicatat bahwa asal sosial dan ideologi konservatif radikal berakar dari Salafisme dan Wahabisme, meskipun juga dipengaruhi oleh perkembangan sejarah Islam di Arab Saudi di bawah pengaruh ideologis Muhammad bin al Wahhab pada abad ke-17 dan ke-18 di Timur Tengah dan Afrika Timur. Oleh karena itu, pengaruh Salafisme dan Wahhabisme tetap eksis dan bahkan berkembang lebih jauh hingga dekade ini.

### ***Islam Liberal***

Istilah Islam liberal dapat dirujuk pada tradisi pendekatan ketiga dalam perdebatan tentang interpretasi sosioreligius khususnya dalam hubungan antara Islam dan dunia kontemporer dan modernisasi. Menurut Kurzman, ada tiga tradisi dalam sejarah perdebatan.<sup>11</sup> Yang pertama disebut Islam adat. Tradisi ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara pengamalan adat istiadat lokal/daerah dengan pengamalan ajaran Islam. Penampilan praktis dari tradisi ini dilokalisasi di berbagai wilayah komunitas Islam seperti di Asia Tenggara (Indonesia), Maroko, Iran, dan tempat-tempat lain. Tradisi kedua disebut Islam revivalis, sering juga diberi label sebagai Islamisme, fundamentalisme, atau Wahhabisme. Tradisi ini pada dasarnya merupakan reaksi terhadap Islam adat dengan doktrin perlunya kembali ke praktik asli Islam berdasarkan ajaran Nabi Muhammad. Tradisi ini menekankan pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa wahyu dan menyerang Islam adat sebagai tidak murni Islam. Praktik lokal dan institusi lokal yang dicampur dengan beberapa ajaran Islam seperti yang dipraktikkan oleh Islam adat dianggap tidak otentik dan tidak Islami. Kedua tradisi ini telah dominan dalam interpretasi sosial-keagamaan Islam cukup lama.

Kurzman mengingatkan kita bahwa ada tradisi besar ketiga yang diabaikan yang bisa disebut Islam Liberal. Tradisi ini pada dasarnya percaya bahwa Muslim / Islam harus merangkul modernitas dan menafsirkan ajaran Islam tanpa harus memiliki hubungan bermusuhan dengan dunia modern. Kurzman menyatakan: "Banyak analisis perdebatan Islam berhenti dengan dua tradisi ini, adat dan revivalis, dan mengabaikan tradisi besar ketiga .... Islam *liberal*, seperti Islam revivalis, mendefinisikan dirinya berbeda dengan tradisi adat dan menyerukan preseden periode awal Islam untuk mendelegitimasi praktik masa kini. Namun Islam liberal menyerukan masa lalu atas nama modernitas, sementara revivalis dapat dikatakan menyerukan modernitas (misalnya, teknologi elektronik) atas nama masa lalu. Ada berbagai versi liberalisme Islam (beberapa mode dibahas di sini nanti), tetapi satu elemen umum adalah kritik terhadap tradisi adat dan revivalis untuk apa yang kadang-kadang disebut kaum liberal sebagai "keterbelakangan," yang dalam pandangan mereka telah mencegah dunia Islam menikmati buah modernitas: kemajuan ekonomi, demokrasi, hak-hak hukum, dan sebagainya. Sebaliknya, tradisi liberal berpendapat bahwa Islam, dipahami dengan benar, kompatibel dengan—atau bahkan

---

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, "Islam dan Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition," ed. oleh Charlez Kurzman, *Liberal Islam* (New York: Oxford University Press, 1998).

pendahulu—liberalisme Barat".<sup>12</sup> Islam liberal berkaitan dengan banyak aspek kehidupan politik modern umat Islam khususnya dalam ekonomi, politik (demokrasi), hukum / hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan sebagainya.

Sarjana lain setuju dengan Kurzman ketika mengkonseptualisasikan Islam Liberal. Dalam esainya yang mengkritik Islam Liberal, Ali misalnya memandang bahwa Muslim Liberal pada dasarnya percaya bahwa modernitas kompatibel dengan Islam.<sup>13</sup> Dia menyatakan: "Muslim liberal memulai wacana mereka dengan mengusulkan bahwa umat menghadapi modernitas barat, modernisasi, globalisasi, teknologi informasi, dan banyak tantangan eksternal lainnya. Mengingat pernyataan berikutnya bahwa ia tidak memiliki kekuatan sains dan teknologi, mereka menekankan bahwa umat harus fokus pada mengatasi tantangan-tantangan ini dan bahwa umat Islam harus berinteraksi dengan Barat yang maju dan mengambil darinya apa pun yang baik dan dapat diterapkan. Dengan kata lain, mereka dituntut untuk berpikir dan bertindak dalam hal adopsi, rekonsiliasi, dan akomodasi. Dengan demikian, Islam dan modernitas kompatibel".<sup>14</sup>

Dalam aspek modernitas atau kehidupan sosial dan politik modern yang lebih praktis dan spesifik, Islam liberal menunjukkan beberapa sikap dan institusi perlu hadir atau beradaptasi dan tumbuh di komunitas atau negara Muslim. Beberapa aspek tersebut adalah sikap dan kebebasan individu modern, toleransi, demokrasi, atau politik dan kehidupan publik secara umum. Hashmi<sup>15</sup>, antara lain, menekankan pentingnya "etos Islam liberal": "Saya memahami "etos Islam liberal" terutama seperangkat sikap dan institusi yang muncul dari dan pada gilirannya memelihara sikap-sikap itu. Sikap dan institusi ini terletak pada individu dan masyarakat yang mereka bentuk, bukan terutama di negara. Sikap dan institusinya liberal dalam arti berpikiran luas dan toleran terhadap anggota masyarakat yang berbeda dalam keyakinan agama atau ideologi politik dari mayoritas. Mereka liberal dalam menegakkan persamaan hak semua anggota masyarakat. Mereka liberal dalam menganggap negara bertanggung jawab dan pelayan masyarakat warga negara, bukan sebaliknya. Singkatnya, saya memahami tugas menumbuhkan etos Islam liberal yang sebagian besar identik dengan menciptakan dan memperluas masyarakat sipil Islam".

Mengenai isu-isu kebebasan dan kemanusiaan, Masmoudi menegaskan: "Islam liberal adalah cabang, atau sekolah, Islam yang menekankan kebebasan manusia dan kebebasan dalam Islam. Muslim liberal percaya bahwa manusia diciptakan bebas – sebuah konsep yang sangat penting untuk disoroti di dunia Muslim saat ini – dan bahwa jika Anda mengambil atau mengurangi kebebasan, Anda sebenarnya bertentangan dengan sifat manusia serta kehendak ilahi. Sementara beberapa orang ingin memaksakan pandangan mereka pada orang lain, Muslim liberal bersikeras bahwa orang-orang — baik pria maupun wanita — harus bebas memilih bagaimana mempraktikkan iman mereka".<sup>16</sup> Menggemakan ini Kubba menyatakan bahwa: "... dalam mencoba mendefinisikan siapa yang liberal atau modernis di kalangan umat Islam terletak pada sikap mereka mengenai hubungan antara tradisi di satu sisi, dan politik atau kehidupan publik di sisi lain".<sup>17</sup>

Di Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, wacana dan gerakan yang berkaitan dengan Islam liberal telah hadir cukup lama. Seiring dengan perkembangan sosial-ekonomi yang berlangsung pesat, intelektual Muslim Indonesia

<sup>12</sup> Charles Kurzman, ed., *Liberal Islam: A Sourcebook*, 1st edition (New York: Oxford University Press, 1998).

<sup>13</sup> Muhammad Mumtaz Ali, "Liberal Islam: An Analysis," *American Journal of Islam and Society* 24, no. 2 (2007): 44–70, doi:10.35632/ajis.v24i2.420.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Radwan A. Masmoudi, "What Is Liberal Islam? The Silenced Majority," *Journal of Democracy* 14, no. 2 (2003): 40–44, doi:10.1353/jod.2003.0040.

<sup>17</sup> Ibid., 48.

juga telah tumbuh. Ini juga memiliki konsekuensi pada bagaimana Muslim memandang modernitas dan bagaimana Islam harus dikaitkan dengannya. Mengenai hal ini, Abdi mengamati: "Sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an, para sarjana tentang Islam Indonesia telah memperhatikan munculnya pemikiran Islam 'baru' yang liberal dan progresif dalam karakter di kalangan intelektual Muslim tertentu.<sup>18</sup> Diidentifikasi secara beragam oleh para sarjana yang berbeda sebagai "neo-modernisme Islam", "Islam sipil", "Islam budaya", "Islam liberal" atau "Islam progresif", pemikiran Islam baru ini secara konsisten mengklaim bahwa "cita-cita modern tentang kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi bukanlah nilai-nilai Barat yang unik, tetapi kebutuhan modern yang kompatibel dengan, dan bahkan diperlukan oleh, cita-cita Muslim ". Aliran pemikiran Islam ini secara spontan berkembang baik di kalangan "tradisionalis" maupun kubu "modernis".

Abdi menekankan bahwa Indonesia adalah contoh utama dari negara mayoritas Muslim di mana Muslim telah berurusan dengan isu-isu sosial dan politik modern yang sebagian besar kompatibel dengan sudut pandang Islam liberal. Dalam penilaiannya: "Dari perspektif Islam komparatif, sejauh mana intelektual Muslim Indonesia terlibat dengan ide-ide modern seperti demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan masyarakat sipil luar biasa. Seperti yang dicatat Hefner<sup>19</sup>, alih-alih nasionalis sekuler, para intelektual Muslim yang berpikiran reformis "yang telah menjadi audiens dan pendukung terbesar bagi ide-ide demokratis dan pluralis di Indonesia sejak 1980-an. Dia bahkan menyarankan bahwa "tidak ada tempat di dunia Muslim yang memiliki intelektual Muslim yang terlibat dalam ide-ide demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, masyarakat sipil dan supremasi hukum dengan kekuatan dan kepercayaan diri yang setara dengan Muslim Indonesia." Sarjana lain menegaskan pernyataan Hefner yang menunjukkan bahwa liberalisme Islam "telah membekas dengan sendirinya, tidak hanya pada wacana Islam, tetapi juga pada wacana nasional umum".<sup>20</sup>

Salah satu isu besar yang selalu menjadi perdebatan di Indonesia adalah hubungan antara Islam dan politik. Penafsiran ajaran Islam tentang masalah ini, menurut beberapa intelektual Islam terkemuka menghasilkan setidaknya tiga kubu.<sup>21</sup> Pertama, pandangan bahwa Islam dan politik/negara tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini terinspirasi oleh pemahaman bahwa Islam adalah cara hidup yang lengkap di mana politik adalah bagian dari kehidupan publik Muslim. Ini adalah semacam jenis interpretasi Islam konservatif atau revivalis yang terkait dengan modernitas. Kedua adalah pandangan bahwa Islam dan politik/negara dapat dipisahkan, dan hubungan mereka harus dipahami dari sudut pandang sekularistik. Modernitas, termasuk politik dan demokrasi dalam pandangan ini harus berjalan beriringan selama mereka berada di tempat mereka sendiri. Ini adalah semacam pandangan Islam sekuler dan liberal. Kubu ketiga melihat bahwa Islam dan politik/negara, atau modernitas berada dalam hubungan yang sedang berlangsung. Keduanya harus dapat melakukan perdebatan berkelanjutan untuk menemukan hubungan praktis yang paling masuk akal. Kubu ketiga ini dapat dianggap sebagai jenis pendekatan Islam moderat dan liberal.

Singkatnya, Islam liberal adalah pemahaman atau pandangan yang melihat modernitas dan semua aspek terkaitnya seperti demokrasi, pembangunan ekonomi, hak-hak minoritas (termasuk hak-hak perempuan), kebebasan individu, dll., Tidak dalam hubungan bermusuhan dengan Islam. Bahkan, Islam, ditafsirkan dengan benar, kompatibel dengan kehidupan modern.

<sup>18</sup> Supriyanto Abdi, "Islam and (Political) Liberalism: A Note on an Evolving Debate in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 3, no. 2 (2009): 370–89, doi:10.15642/JIIS.2009.3.2.370-389.

<sup>19</sup> Hefner, R. W. (2003). "Political Islam in Southeast Asia: Assessing the trends (keynote Address)." Presented at the conference *Political Islam in Southeast Asia*, Washington D. C., 25 March 2003.

<sup>20</sup> Abdi, "Islam and (Political) Liberalism."

<sup>21</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997).

### ***Konteks Sosio-Politik Muslim Indonesia***

Muslim Indonesia secara luas diakui sebagai Muslim moderat, mengingat bahwa mereka umumnya lebih berpikiran terbuka, toleran, dan menghormati pluralisme. Dalam hal ini, tidak berlebihan bahwa Indonesia sebelumnya diakui sebagai panutan demokrasi bagi negara-negara Muslim. Tapi, bukti menunjukkan bahwa sejak jatuhnya rezim Orde Baru Suharto dan kebangkitan era reformasi, pengamat dan media internasional menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi benih Muslim moderat. Hal ini dikarenakan, setelah jatuhnya rezim Soeharto, Indonesia menghadapi kebangkitan konservatisme dan radikalisme Islam seperti yang dijelaskan di atas. Mereka juga merupakan kegagalan Muslim moderat dalam menanggapi munculnya gerakan radikal Islam. Bahkan, gerakan-gerakan Islam radikal menyebarkan secara luas semangat sikap intoleransi, anti-pluralisme, dan gagasan pemikiran syariat yang ketat, legal, dan eksklusif, yang dianggap tidak sesuai dengan karakteristik dan keislaman arus utama Muslim moderat di Indonesia.<sup>22</sup>

Dinamika sosial dan politik Islam Indonesia telah menarik perhatian yang cukup besar dari banyak sarjana. Bagi banyak cendekiawan, Islam Indonesia telah digambarkan sebagai rumah Islam moderat. Perkembangan sejarah Islam yang unik di negara ini telah mendefinisikan karakteristik Islam di Indonesia sebagai toleran dan menghormati perbedaan sosial-agama. Baik NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Muslim terbesar di negara ini telah terbuka dan menerima ide-ide agama baru, sehingga memungkinkan kedua organisasi untuk menyesuaikan pandangan agama mereka dengan perkembangan sosial dan politik kontemporer masyarakat Indonesia. Namun, seperti yang ditunjukkan secara singkat di atas, perkembangan politik saat ini di negara ini telah menimbulkan tantangan baru bagi elit agama tidak hanya dari dua organisasi keagamaan tetapi juga organisasi keagamaan dan sosial lainnya di negara ini. Masuk akal untuk mengasumsikan bahwa para pemimpin organisasi akan menanggapi perkembangan saat ini berdasarkan penilaian mereka terhadap kondisi tersebut. Namun, keprihatinan yang luar biasa dengan munculnya konservatisme dan intoleransi di kalangan umat Islam selama dua dekade terakhir telah mengabaikan dinamika agama dan sosial-ekonomi kelompok toleran. Sementara banyak yang telah dikatakan tentang pertumbuhan konservatisme agama atau radikalisme, kita tidak tahu persis perkembangan internal dari apa yang disebut Muslim moderat.

### ***Bangkitnya Konservatisme Agama***

Liberalisasi politik setelah jatuhnya rezim Suharto telah membuka keran demokrasi bagi kaum Islamis dan partai-partai politik untuk menyuarakan tuntutan mereka secara terbuka dan keras.<sup>23</sup> Dalam iklim keterbukaan ini, studi tentang gerakan Islam juga berkembang, terutama tentang radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme, di mana studi tentang Islam politik sebelumnya dibatasi.<sup>24</sup> Seperti yang telah ditunjukkan banyak orang, dua jenis kelompok Islam radikal muncul selama era pasca-1998. Pertama adalah organisasi yang terbuka dan terlihat. Gerakan-gerakan ini mudah diidentifikasi karena pendiri, anggota, dan aktivitas mereka transparan. Selain itu, mereka merekrut anggota secara terbuka. Kelompok-kelompok 'terbuka' ini termasuk mereka yang muncul dari Indonesia dan mereka yang berafiliasi dengan Islam transnasional di Timur Tengah. Kelompok-kelompok lokal termasuk Laskar Jihad, FPI, MMI, dan kelompok-kelompok radikal kecil lainnya. Mereka yang memiliki hubungan Timur Tengah termasuk Jama'ah

<sup>22</sup> M. Syafi'i Anwar, *The Clash of Religio-Political Thought: The Contest Between Radical Conservative Islam and Progressive Liberal Islam in Post Soeharto Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

<sup>23</sup> B Effendy, "Enforcement of Shari'ah in Indonesia: Challenges and prospects," dalam *Islam and Democracy* (Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung Singapore, 2004), 75.

<sup>24</sup> Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia," *South East Asia Research* 10, no. 2 (2002): 117-54.



Ikhwanul Muslimin (JAMI), yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin (Ikhwanul Muslimin) di Mesir, dan HTI, sebuah bab dari HT, yang dibuat oleh Sheikh Taqiyuddin An-Nabhani di Yerusalem pada tahun 1953.

Kategori kedua terdiri dari organisasi tertutup atau bawah tanah. Kelompok-kelompok ini sulit untuk mengidentifikasi dan merekrut anggota secara diam-diam. Jemaah Islamiyah termasuk dalam kategori ini. Fealy berpendapat bahwa "semua organisasi ini mencari perubahan dramatis dalam masyarakat dan politik Indonesia".<sup>25</sup> Fealy lebih lanjut berpendapat bahwa kelompok Islam radikal di Indonesia dapat dibagi menjadi empat jenis; (1) politik, pendidikan, dan intelektual; (2) main hakim sendiri, adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mencegah perbuatan salah dan asusila, terutama yang tidak dipedulikan oleh aparat penegak hukum; (3) paramiliter; dan (4) teroris.<sup>26</sup> Kategori pertama terdiri dari kelompok-kelompok yang tidak menggunakan kekerasan dalam mengejar perubahan Islam radikal, seperti HTI. Dalam kategori main hakim sendiri adalah FPI dan kelompok paramiliter lainnya, misalnya, Laskar Jihad. Teroris mengacu pada individu dan organisasi yang menggunakan kekerasan atas nama agama.

Solidifikasi gerakan Islam radikal di Indonesia terjadi secara masif dan terstruktur dengan baik. Gerakan ini tidak hanya menasar tujuan ideologis-politik dan kepentingan kenegaraan tetapi juga merambah berbagai aspek kehidupan di masyarakat, termasuk ekspresi keagamaan. Oleh karena itu, berbagai gerakan Islam radikal dan khususnya Islam transnasional yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai gerakan Islam radikal. Karena telah merambah berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, banyak yang beranggapan bahwa gerakan radikal keagamaan ini harus direduksi keberadaannya atau bahkan dihilangkan dalam ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Karena secara ideologis-politik, keberadaan gerakan radikal keagamaan akan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari ekspresi agama, keberadaan gerakan radikal agama ini akan berbenturan dengan sikap moderat dalam beragama yang telah mapan kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini karena gerakan mereka lebih fundamentalis dan menunjukkan ketidakmoderatan dalam ekspresi agama mereka.

### ***Kebangkitan dan Kemunduran Islam Liberal***

Adanya liberalisasi politik di era reformasi membuka jalan bagi Islam liberal ikut bermunculan di antara berbagai kelompok organisasi keagamaan di Tanah Air. Menurut Greg Fealy, era reformasi tidak hanya menawarkan berbagai kebebasan, tetapi juga memberikan tantangan besar bagi Islam progresif.<sup>27</sup> Cendekiawan dan kelompok liberal harus bersaing di pasar terbuka daripada di dalam Orde Baru yang membatasi dan membatasi diskusi publik tentang Islamisme. Lebih lanjut, Fealy berpendapat Muslim Liberal sangat prihatin dengan penyebaran Islamisme melalui partai politik, media dan kelompok masyarakat sipil. Beberapa dari kelompok-kelompok ini telah lama bergerak di bawah tanah, dan yang lainnya berasal dari jaringan longgar, dimobilisasi oleh tokoh-tokoh karismatik. Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang (PBB), Hizbut Tahrir Indonesia dan FPI termasuk di antara partai-partai dan kelompok-kelompok yang berjuang di garis Islamisme. Media Islam pun turut berkembang pesat, di antaranya majalah Sabili yang menjadi majalah dengan penjualan terbanyak pada tahun 2001 dan 2002.

---

<sup>25</sup> Greg Fealy dan Aldo Borgu, *Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia* (Australia: Australian Strategic Policy Institute, 2005).

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Greg Fealy, "Reformasi and the Decline of Liberal Islam," dalam *Activists in Transition, Progressive Politics in Democratic Indonesia* (Southeast Asia Program Publication: Cornell University Press, 2019), 117–34, doi:10.7591/cornell/9781501742477.003.0007.

Dalam kondisi ini, Jaringan Islam Liberal (JIL) pada tahun 2001 lahir di tangan ulama muda Islam yang dipimpin oleh Ulil Abshar Abdalla. Akar intelektual kelompok ini kembali ke pemikir pluralis pada 1970-an seperti Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Mukti Ali untuk beberapa nama. Kelompok ini, yang terdiri dari Ulil, bersama dengan Luthfi Assyaukanie dan Budhi Munawar Rahman dan beberapa pemikir lain yang terkait dengan Enklave Utan Kayu di Jakarta sangat aktif menyuarakan gagasan Islam Liberal, di mana Islam sesuai dengan pluralisme, negara sekuler, dan ekonomi pasar. Dalam bacaan mereka, menurut Bouchier dan Jusuf, "Alquran dapat ditafsirkan dengan cara yang akan mendukung norma-norma liberal, termasuk larangan poligami, mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, dan pernikahan antar agama".<sup>28</sup>

Akibatnya, kelompok-kelompok Muslim konservatif marah dan menganggap JIL sebagai organisasi sesat. Salah satu fatwa tentang halal darah Ulil oleh Majelis Ulama Indonesia, yang saat itu didominasi oleh beberapa pengurus ultra-konservatif. Dentang kematian kelompok Islam liberal ditandai dengan dikeluarkannya fatwa pada tahun 2005 yang mengutuk "liberalisme, sekularisme dan pluralisme" sebagai 'melawan ajaran Islam'. Atas dasar ini FPI menyerang dan mengintimidasi kelompok Islam liberal.

Oleh karena itu, meskipun mendapat perhatian media dan beasiswa untuk beberapa waktu, gerakan ini gagal mendapatkan jumlah pengikut yang signifikan, dan sejak 2015 telah berkurang. Pada akhir dekade, istilah liberal telah distigmatisasi di mana beberapa sarjana yang diklaim oleh pendukung liberal menolak untuk dikaitkan dengan istilah tersebut. Para pemimpin dan pengikutnya masih bergerak secara sporadis dalam menyebarkan gagasan Islam liberal. Ulil, pada kenyataannya, tampaknya menjadi salah satu juru bicara kelompok moderat dengan mengajarkan pertemuan keagamaan online dengan membahas Ihya Ulumuddin oleh Al-Gazaly. Dia juga anggota inti dari komite PB NU dan memimpin kegiatan Halaqah Peradaban.

### ***Respon Muslim Moderat***

Meningkatnya pengaruh konservatisme di masyarakat telah menempatkan kelompok moderat agama dalam situasi yang sulit. Sebagian besar Muslim Indonesia dapat dikategorikan sebagai Muslim moderat yang diwakili oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Namun, berbagai tindakan kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok Muslim radikal seperti Front Pembela Islam (FPI) dan kegiatan teroris yang telah menyebar di berbagai kota, seperti Surabaya dan Makassar untuk beberapa nama, serta jaringan ISIS yang menyebar ke Papua telah menggugat moderatisme Islam di negara ini. Selain itu, jaringan gerakan Islam transnasional seperti Jemaah Tarbiyah, Salafi-Wahhabi, Hizbut Tahrir Indonesia yang secara aktif menyebarluaskan pendirian negara Islam dan kekhalifahan global melalui sekolah-sekolah dan media sosial di seluruh negeri semakin mengkhawatirkan.<sup>29</sup> Akibatnya, penetrasi kelompok-kelompok radikal dan transnasional ini menyebabkan situasi yang disebut sebagai "belokan konservatif".<sup>30</sup> Selain itu, Menchik berpendapat bahwa moderasi Islam melalui NU dan Muhammadiyah juga menunjukkan nilai-nilai kedua organisasi tersebut sesuai dengan demokrasi dan otoritarianisme.<sup>31</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak lapisan masyarakat untuk mengatasi kebangkitan konservatisme. Pemerintah Indonesia telah melarang HTI pada tahun 2017,

<sup>28</sup> David Bouchier dan Windu Jusuf, "Liberalism in Indonesia: Between Authoritarian Statism and Islamism," *Asian Studies Review* 47, no. 1 (2 Januari 2023): 69–87, doi:10.1080/10357823.2022.2125932.

<sup>29</sup> Abdurakhman, "Gerakan tarbiyah, 1980-2010: Respon ormas Islam terhadap gerakan Islam transnasional (Tarbiyah Movement, 1980-2010: Responses of Islamic mass organisations toward transnational Islam)" (Unpublished Thesis, Universitas Indonesia, 2015).

<sup>30</sup> van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam*.

<sup>31</sup> Jeremy Menchik, "Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia," *Asian Studies Review* 43, no. 3 (3 Juli 2019): 415–33, doi:10.1080/10357823.2019.1627286.

mengingat gerakannya yang ingin mengubah ideologi Indonesia menjadi kekhalifahan. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia juga melarang FPI (Front Pembela Islam). Selain itu, setiap gerakan radikal keagamaan yang terjadi di Indonesia juga telah diupayakan untuk melakukan deradikalisasi. Eksponen terorisme berbasis agama, yang merupakan turunan dari radikalisme agama di tingkat tertinggi, juga telah dihilangkan dengan cepatnya Detasemen Khusus 88 Kepolisian Republik Indonesia. Banyak anggotanya telah dideradikalisasi, seperti anggota teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang tertangkap, dan juga berkonsultasi yang masih dalam upaya untuk menyerahkan diri. Berbagai organisasi keagamaan yang selama ini selalu berorientasi pada kekerasan juga diupayakan untuk melakukan deradikalisasi. Namun, semua itu tentu tidak akan menghentikan upaya penanggulangan radikalisme agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Memang, telah terjadi gerakan tandingan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok konservatif. Istilah Islam moderat di tanah air semakin ditantang, apalagi dengan upaya pemerintah Indonesia melalui kementerian agama yang mengampanyekan moderasi beragama seperti disebutkan di atas. Namun, definisi Muslim moderat perlu terus didefinisikan karena tantangan dan dinamika masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Tidak semua Muslim Indonesia atau organisasi Muslim setuju atau mendukung promosi moderasi beragama Kementerian Agama, sehingga lebih sulit untuk menghentikan proliferasi pandangan konservatif dan membela Islam moderat. Karena banyak wacana agama di negara ini dibuat oleh elit agama, kondisi ini membuatnya perlu untuk lebih memahami pandangan agama dan politik elit agama di negara ini. Lebih penting lagi, penting untuk memahami posisi Muslim moderat dan bagaimana mereka berbeda dari kelompok agama lain.

### **Kesimpulan**

Sebagian besar elit politik Muslim di Jakarta tampaknya masih menganut jalan moderat dalam memahami isu-isu ideologis. Namun, beberapa dari mereka masih menunjukkan kecenderungan konservatisme. Temuan yang menggunakan analisis sosio-politik ini membenarkan penelitian sebelumnya bahwa beberapa elit Muslim masih merangkul dan menerapkan ide-ide konservatif dalam pola pikir dan perilaku mereka. Penelitian ini terbatas karena situs dan ruang lingkungannya. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di sebagian wilayah Indonesia untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

### **Pengakuan**

Artikel ini merupakan bagian dari Laporan Penelitian Berbasis Fakultas UIII berjudul “MUSLIM MODERAT, KONSERVATIF, DAN LIBERAL: PEMETAAN SPEKTRUM IDEOLOGI ELIT MUSLIM INDONESIA, 2022, yang didanai oleh Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Naskah paper yang awalnya berbahasa Inggris ini telah dipresentasikan pada ICONIS 2023 di Kuala Lumpur. Untuk Kepentingan *Proceeding* ini dan guna dibaca lebih luas oleh masyarakat Indonesia, maka naskah ini sengaja diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Sementara naskah asli yang berbahasa Inggris akan diterbitkan oleh satu jurnal ilmiah untuk publikasi internasional.

### **Bibliografi**

Ab Rashid, Radzuwan, Syed Ali Fazal, Zulazhan Ab. Halim, Nasharudin Mat Isa, Zuraidah Juliana Mohamad Yusoff, Razali Musa, dan Mohd Isa Hamzah. “Conceptualizing the Characteristics of Moderate Muslims: A Systematic Review.” *Social Identities* 26, no. 6 (2020): 829–41. doi:10.1080/13504630.2020.1814720.

- Abdi, Supriyanto. "Islam and (Political) Liberalism: A Note on an Evolving Debate in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 3, no. 2 (2009): 370–89. doi:10.15642/JIIS.2009.3.2.370-389.
- Abdurakhman. "Gerakan tarbiyah, 1980-2010: Respon Ormas Islam terhadap Gerakan Islam Transnasional." Unpublished Thesis, Universitas Indonesia, 2015.
- Ali, Muhammad Mumtaz. "Liberal Islam: An Analysis." *American Journal of Islam and Society* 24, no. 2 (2007): 44–70. doi:10.35632/ajis.v24i2.420.
- Anwar, M. Syafi'i. *The Clash of Religio-Political Thought: The Contest Between Radical Conservative Islam and Progressive Liberal Islam in Post Soeharto Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Bourchier, David, dan Windu Jusuf. "Liberalism in Indonesia: Between Authoritarian Statism and Islamism." *Asian Studies Review* 47, no. 1 (2023): 69–87. doi:10.1080/10357823.2022.2125932.
- Bruinessen, Martin van, ed. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn."* Books and Monographs. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2013.
- . "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia." *South East Asia Research* 10, no. 2 (2002): 117–54.
- Effendy, B. "Enforcement of Shari'ah in Indonesia: Challenges and prospects." Dalam *Islam and Democracy*. Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung Singapore, 2004.
- Fealy, Greg. "Reformasi and the Decline of Liberal Islam." Dalam *Activists in Transition, Progressive Politics in Democratic Indonesia*, 117–34. Southeast Asia Program Publication: Cornell University Press, 2019. doi:10.7591/cornell/9781501742477.003.0007.
- Fealy, Greg, dan Aldo Borgu. *Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia*. Australia: Australian Strategic Policy Institute, 2005.
- Hefner, R. W. (2003). Political Islam in Southeast Asia: Assessing the trends (keynote Address). Presented at the conference *Political Islam in Southeast Asia*, Washington D. C., 25 March 2003.
- Jamhari, dan J. Jahroni. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Kurzman, Charles, ed. *Liberal Islam: A Sourcebook*. 1st edition. New York: Oxford University Press, 1998.
- Masmoudi, Radwan A. "What Is Liberal Islam? The Silenced Majority." *Journal of Democracy* 14, no. 2 (2003): 40–44. doi:10.1353/jod.2003.0040.
- Menchik, Jeremy. "Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia." *Asian Studies Review* 43, no. 3 (2019): 415–33. doi:10.1080/10357823.2019.1627286.
- Mirahmadi, Hedieh. "Navigating Islam in America." Dalam *The Other Muslims: Moderate and Secular*, disunting oleh Zeyno Baran, 17–32. New York: Palgrave Macmillan US, 2010. doi:10.1057/9780230106031\_2.
- Rahman, Fazlur. "Islam dan Modernitiy: Transformation of an Intellectual Tradition." disunting oleh Charlez Kurzman. *Liberal Islam*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Sebastian, Leonard C., Syafiq Hasyim, dan Alexandre R. Arifianto. "Introduction: Rising Islamic conservatism in Indonesia: Islamic groups and identity politics." Dalam *Rising Islamic Conservatism in Indonesia*, 1 ed. London: Routledge, 2020.
- Tim Penulis. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- Zuhur, Sherifa. "J is for Jihad." PRECISION IN THE GLOBAL WAR ON TERROR: Strategic Studies Institute, US Army War College, 2008. <https://www.jstor.org/stable/resrep12057.40>.